

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Problematika perubahan kurikulum di Indonesia bukan hanya sekadar persoalan ganti menteri ganti kurikulum. Pergantian kurikulum bagi sebagian orang diidentikkan dengan tren yang sudah beredar di masyarakat bahwa ada perubahan kurikulum dikarenakan adanya pergantian menteri baru. Sebaliknya daripada itu, pemerintah melakukan upaya pengembangan kurikulum untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Hal itu dilakukan seiring dengan berkembangnya kemajuan zaman (Angga *et al.*, 2022).

Pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk mencapai hasil dari tujuan pendidikan. Terdapat berbagai alasan kurikulum perlu dikembangkan dari waktu ke waktu. Kurikulum bersifat dinamis dan kontekstual. Kurikulum bersifat dinamis karena dapat disesuaikan seiring berkembangnya zaman dan terbuka terhadap kritik. Kurikulum bersifat kontekstual karena dibutuhkan sesuai dengan zamannya dan relatif karena kebijakan kurikulum menjadi tidak relevan pada zaman-zaman berikutnya. Oleh karena itu, perbaikan kurikulum dilakukan secara terus-menerus (Firdaus *et al.*, 2022).

Inti dari proses pendidikan di sekolah adalah kurikulum. Hasil pendidikan yang dicapai bergantung kepada pelaksanaan kurikulum. Kurikulum adalah media untuk mencapai tujuan dan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan (Mesra & Salem, 2023).

Kurikulum bergantung kepada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan universal pendidikan adalah mewujudkan manusia dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Pendidikan bukan hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan tenaga- tenaga terampil untuk pembangunan fisik. Akan tetapi, pendidikan lebih kepada membentuk sikap mental dan karakter yang menjadi fondasi bagi

kehidupan peserta didik di masa depan. Tantangan masa depan akan semakin canggih, kompleks, dan menuntut respons perubahan. Respons berupa perubahan kurikulum merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah sebagai pengemban amanat undang-undang (Badriah, 2020).

Fenomena negatif dan tantangan masa depan di masyarakat adalah salah satu penyebab diberlakukannya pengembangan kurikulum. Peserta didik harus dipersiapkan dalam menghadapi tantangan masa depan, yaitu harus dibekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang mumpuni sebagai bekal mencapai kesuksesan di masa depan (Chamisijatin & Permana, 2020). Tantangan terbesar bangsa Indonesia adalah meningkatkan sumber daya manusia. Mayoritas tenaga kerja di Indonesia memiliki tingkat pendidikan rendah, terkategori tenaga kerja tidak terlatih atau berkeahlian rendah menengah. Bangsa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang bermoral, berkualitas dan bermutu dalam membangun peradaban suatu bangsa untuk program pembangunan yang lebih baik.

Pendidikan memiliki tiga peran utama yaitu sebagai agen konservatif (*agent of conservation*), agen inovatif (*agent of innovation*), dan agen perubahan (*agent of change*). Pendidikan sebagai agen konservatif dimaknai secara operasional praktis terbentuk melalui kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya asli (*indigeneous*) yang memiliki ketangguhan serta ketahanan (*homeostatic*) (Manurung *et al.*, 2023). Oleh karena itu, masyarakat akan memiliki jati diri dalam menyikapi arus globalisasi. Pendidikan sebagai agen inovatif yaitu pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, menyosialisasikan, dan mengaplikasikannya. Melalui peran tersebut, pendidikan akan menghasilkan masyarakat pembelajar (*learning society*) yang diekspresikan dengan gemar mencari informasi, menggunakan, dan mengomunikasikannya (Ina *et al.*, 2022). Pendidikan sebagai agen perubahan yaitu pendidikan memiliki konsekuensi terhadap aplikasi dari produk inovasi

pendidikan sehingga menjadi katalisator bagi terjadinya transformasi sosial. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa sekarang, melainkan bersifat dinamis dan antisipatif bagi terjadinya perubahan (Diah, 2022).

Kemajuan suatu bangsa erat hubungannya dengan pendidikan, karena pendidikan sebagai proses pembangunan dan sarana membangun watak bangsa. Kebijakan program untuk meningkatkan mutu pendidikan meliputi tiga aspek utama. Pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang dan jenis pendidikan. Kedua, meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru. Ketiga, pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan agar senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan berkesinambungan (*continuous quality improvement*) (Jannah, 2021).

Tidak dapat dipungkiri bahwa peningkatan sumber daya manusia diperoleh dari pendidikan. Perbaikan pendidikan secara menyeluruh dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Usaha perbaikan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya dengan mengembangkan kurikulum agar peserta didik kelak siap menghadapi tantangan masa depan. Pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk mempersiapkan para generasi masa depan agar siap bersaing dengan tantangan globalisasi dan mempersiapkan generasi yang berbudi luhur dan bermoral seperti yang dicanangkan dalam Kurikulum 2013, yaitu mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik. Selain memperkuat tiga kompetensi Kurikulum 2013 juga diharapkan dapat membentuk karakter peserta didik serta meningkatkan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik (Mustafa & Dwiyo, 2020).

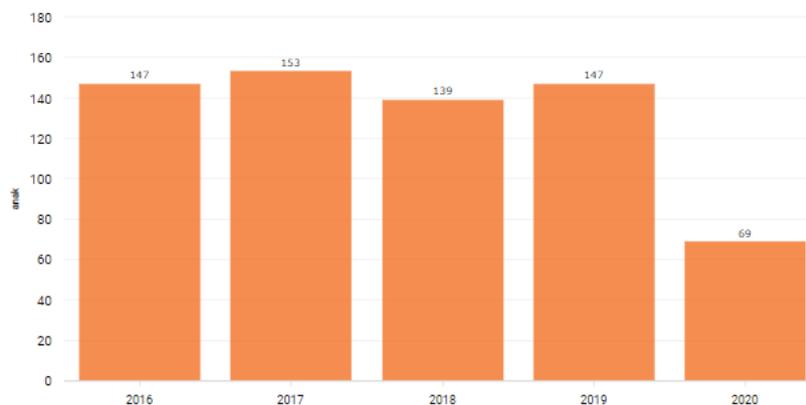
Penerapan kurikulum 2013 dimulai dari sejumlah persepsi di antaranya tantangan masa depan, kompetensi masa depan, fenomena negatif, persepsi publik. Keempat, persepsi tersebut mendasari beberapa aspek dominan yaitu konvergensi ilmu pengetahuan dan teknologi, kualitas, investasi dan transformasi di sektor pendidikan serta kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan untuk mempertimbangkan aspek moral dari suatu masalah, plagiarisme, dan keresahan sosial serta minimnya karakter (Manaf & Hammami, 2020).

Berbagai fenomena negatif di masyarakat diartikan sebagai problem pendidikan karakter, yaitu perilaku generasi muda maupun pelajar yang melakukan akhlak tidak mulia, seperti meningkatnya kasus bullying, kekerasan anak, kekerasan kepada guru, narkoba, perkelahian, tindak asusila dan gejolak masyarakat lainnya (Fika & Maknun, 2023). Fenomena negatif tersebut terjadi karena banyak hal di antaranya kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, berkembang pesatnya media elektronik dan internet, kurangnya pendidikan moral dan agama pada anak, serta pengaruh pergaulan bebas. Selain itu, terdapat banyak kasus perkelahian massal antarpelajar dan coret-coret baju seragam sekolah dilakukan oleh sebagian banyak pelajar setelah pengumuman kelulusan UAN. Kasus lain yang sudah terjadi, yaitu pelajar mudah stres dalam menghadapi problem pribadi dan masa depan.

Hal lain terkait dengan fenomena negatif di masyarakat sebagaimana data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2019 menunjukkan angka kekerasan anak di dunia pendidikan mencapai 127 kasus. Kekerasan yang terjadi di lembaga pendidikan melibatkan guru atau kepala sekolah, siswa dan orang tua siswa. Berdasarkan data KPAI, kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan seksual berjumlah 17 kasus dengan korban 89 anak yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki – laki dengan pelaku mayoritas adalah 88% guru dan 22% kepala sekolah. Adapun pelaku guru terdiri dari guru olahraga 6 orang, guru agama 2 orang, guru kesenian 1 orang, guru komputer 1 orang, guru IPS 1 orang dan guru kelas 4 SD 4 orang dari 17 kasus kekerasan seksual, 11 kasus terjadi di jenjang SD, 4 kasus

di SMP dan 2 di SMA. Sedangkan dalam kasus kekerasan fisik, KPAI melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap 21 kasus yang terdiri dari 7 kasus di jenjang SD, 5 kasus di SMP, 3 kasus SMA dan 4 kasus di SMK dari total 21 kasus dengan korban kekerasan mencapai 65 anak, sedangkan guru korban kekerasan ada 4 orang (Bunga, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan pengalaman paparan kekerasan yang pernah dialami meliputi kekerasan fisik, psikis, dan cyberbullying. Dampak kekerasan terhadap anak dirasakan oleh korban juga pelaku kekerasan. Dampak yang dialami korban antara lain anak menjadi sering merenung dan pendiam, depresi, stres, susah tidur, menghindari keramaian, ingin melakukan tindakan yang sama sebagai balas dendam, memar dan luka. Dampak bagi pelaku antara lain penyesalan, ditegur dari sekolah, dikeluarkan dari sekolah, pengucilan dari masyarakat, dan penilaian yang buruk dari masyarakat (Aryani, 2021).



Gambar 1. 1 Jumlah Anak – Anak Pelaku Kekerasan di Indonesia

Sumber: Pahlevi-databoks (2022)

Berdasarkan gambar di atas, menunjukkan hasil pencatatan dari KPAI selama periode 2016 – 2020, dimana terdapat total 655 anak yang harus berhadapan dengan hukum karena menjadi pelaku kekerasan. Rinciannya 506 anak melakukan kekerasan fisik dan 149 anak melakukan kekerasan psikis. Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ini konsisten berada di atas 100 orang per tahun selama 2016-2019. Angkanya kemudian turun menjadi 69 anak pada 2020 dengan rincian 58 anak sebagai pelaku kekerasan fisik dan 11 anak pelaku kekerasan psikis. Fenomena kekerasan sangat represif masuk ke kehidupan anak dari berbagai media.

Tentunya fenomena saat ini terdapat kebutuhan sekolah untuk membaca kondisi kejiwaan setiap siswanya (Pahlevi, 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah mencanangkan Pelaksanaan Karakter Bangsa pada Puncak Peringatan Hardiknas tahun 2010. Pada saat itu, program tersebut telah mendapat dukungan tidak hanya dari Kementerian Pendidikan Nasional saja, tetapi juga lintas kementerian yang meliputi Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan dan Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Peranan Wanita, dan kementerian terkait lainnya. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya kurikulum berbasis karakter 2013, Hal tersebut bermula dari sarasehan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 14 Januari 2010 dengan tema “Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya Bangsa,” di Hotel Budikara Jakarta (Hakim, 2017). Peserta sarasehan ini adalah para pakar pendidikan, tokoh masyarakat, budayawan, rohaniawan, akademisi, birokrat, praktisi, pengelola pendidikan, dan pihak-pihak lain ikut hadir dalam acara tersebut. Pada akhir sarasehan disepakati komitmen pendidikan budaya dan karakter bangsa yang harus dikembangkan secara komprehensif sebagai proses pembudayaan. Sejalan dengan hal tersebut di atas, disusunlah Kurikulum 2013 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya.

Perbedaan pokok antara Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP 2006) yang selama ini diterapkan dengan Kurikulum 2013 yang dijalankan secara terbatas mulai Juli 2013 berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan silabus adalah kewenangan satuan pendidikan (Magdalena *et al.*, 2020). Namun dalam Kurikulum 2013, kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi kewenangan pemerintah, kecuali mata pelajaran tertentu yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang bersangkutan.

Guru tetap dituntut untuk dapat memahami seluruh pesan dan makna yang terkandung dalam silabus, terutama untuk kepentingan operasionalisasi pembelajaran. Oleh karena itu, kajian silabus tampak menjadi penting, baik dilakukan secara mandiri maupun kelompok sehingga diharapkan para guru dapat memperoleh perspektif yang lebih tajam, utuh dan komprehensif dalam memahami seluruh isi silabus yang telah disiapkan. Aspek yang ditekankan dalam KTSP lebih dominan kepada aspek pengetahuan sehingga penilaiannya juga ditekankan kepada aspek pengetahuan (Hunaefi, 2018).

Kurikulum 2013 adalah penataan kurikulum yang mutakhir. Kurikulum 2013 merupakan kebijakan pemerintah yang diterapkan di sekolah terutama sekolah formal di Indonesia. Kebijakan Kurikulum 2013 sebagai pelengkap dan penyempurna berbagai kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum- kurikulum sebelumnya. Dalam Kurikulum 2013, pendidikan tidak hanya menekankan pada pengetahuan dan keahlian, tetapi juga mengubah pendekatan pengajaran dan sistem penilaian (Mulyasa, 2021).

Terdapat pro dan kontra terkait Kurikulum 2013 sejak awal dicanangkan kurikulum tersebut. Dimulai dari ketidaksiapan sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan, juga rumitnya penilaian yang harus dilakukan sehingga hal tersebut memberatkan guru. Terlepas dari pro dan kontra maupun persepsi yang berkembang di masyarakat, pemerintah terus konsisten dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Perbaikan juga terus dilakukan sejak kurikulum tersebut diterapkan di beberapa sekolah. Selain itu pemerintah juga terus melakukan sosialisasi dan pelatihan di seluruh sekolah sasaran. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum tahun 2006 dan Kurikulum 2013 Pasal 4 dinyatakan bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah dapat

melaksanakan Kurikulum 2006 paling lama sampai dengan tahun pelajaran 2019/2020. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan agar dapat menerapkan Kurikulum 2013. Kesiapan para guru menerapkan metode pengajaran yang baru menjadi kunci keberhasilan implementasi Kurikulum 2013. Guru berperan sebagai fasilitator di dalam menerapkan Kurikulum 2013. Siswa diharapkan menjadi lebih aktif dan mampu merefleksikan materi ajar dalam proses pembelajaran (Kuswandi *et al.*, 2022).

Kurikulum 2013 ditekankan untuk lebih menanamkan nilai – nilai yang tercermin pada sikap dan juga keterampilan yang diperoleh di sekolah. Kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan soft skill dan hard skill berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang seimbang serta mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan amanat tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Hisbullah, 2020).

Pendidikan dikelola dengan manajemen yang baik dan kurikulum yang disempurnakan agar tujuan pendidikan tercapai. Kurikulum 2013 adalah kurikulum penyempurna dari kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2004 (KBK) dan Kurikulum 2006 (KTSP). Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter terutama pada tingkat dasar yang akan menjadi fondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui Kurikulum 2013 yang berbasis karakter, diharapkan dapat mencetak manusia yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Tujuan Kurikulum 2013 yaitu mempersiapkan generasi muda Indonesia yang memiliki keahlian hidup sebagai pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, afektif (sikap sosial dan keagamaan), serta mampu berkontribusi untuk kehidupan sosial, nasional, politik dan kemanusiaan yang lebih baik (Mulyasa, 2021).

Pembelajaran dalam Kurikulum 2013 juga menuntut perubahan pola dari teaching centered learning (TCL) ke arah student centered learning (SCL). Pola pembelajaran teacher centered sudah tidak sesuai dengan kebutuhan karena kurang memadai untuk merealisasikan tujuan pendidikan berbasis karakter dan kompetensi (Fitri *et al.*, 2020). Pembelajaran harus berorientasi pada peserta didik dengan memfokuskan pada terbentuknya karakter dan kompetensi secara terintegrasi, utuh, dan menyeluruh. Tumbuhnya kepedulian dan komitmen yang tinggi dari peserta didik dapat diupayakan agar mereka memiliki kesadaran yang tinggi dalam dirinya. Mereka harus diberitahu tentang hal yang harus dilakukan, kemudian berusaha membentuk pemahaman dan kompetensi yang diinginkan. Hal itu dapat tercapai dengan adanya pengaruh yang kuat dari peran guru.

Penerapan Kurikulum 2013 menuntut guru untuk lebih aktif, kreatif dan inovatif serta dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 mengembangkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu serta dapat belajar secara mandiri (Safitri *et al.*, 2021). Melalui kurikulum 2013, diharapkan peserta didik mempunyai keterampilan abad 21 dengan memiliki soft skill 4-C (communication, collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation). Peserta didik juga diharapkan memiliki budi pekerti dan akhlak mulia dengan pendidikan karakter sehingga peserta didik memiliki pengetahuan yang tinggi serta dapat menginternalisasi nilai karakter dalam perilaku sehari-hari (Sari, 2022).

Dua lembaga pendidikan yang menjadi sekolah percontohan Kurikulum 2013 adalah Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Dawuhansengon II Pasuruan. Kedua lembaga tersebut juga menerapkan pembiasaan – pembiasaan yang bertujuan untuk membentuk karakter pada peserta didik. Karakter yang diharapkan dapat diimplementasikan dalam diri siswa baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat.

Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV adalah salah satu satuan pendidikan dengan menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV mengelola kurikulum 2013 dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan tindakan lanjut dalam membentuk karakter peserta didik. Program – program pembiasaan kepada peserta didik yang unggul untuk membentuk karakter serta berbagai program-program sekolah dan berbagai kegiatan harian sekolah maupun dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I adalah salah satu satuan pendidikan dengan menerapkan Kurikulum 2013. Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I mengelola Kurikulum 2013 mulai dari perencanaan, implementasi, evaluasi dan tindak lanjut dalam membentuk karakter peserta didik. Program pembiasaan di Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I yaitu budaya, adab dan tata cara sesuai tuntunan syariat, ibadah sehari – hari. Program ekstrakurikuler di Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I beraneka ragam. Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I menerapkan kurikulum plus dengan pelaksanaan pembelajaran untuk anak – anak berkebutuhan khusus. Anak – anak tersebut memiliki guru pendamping di setiap kelasnya agar dapat mendampingi saat proses pembelajaran berlangsung.

Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I merupakan lembaga pendidikan yang unggul di Pasuruan. Dua lembaga ini telah banyak mencetak peserta didik yang mencapai prestasi di tingkat regional, nasional dan internasional. Selain itu, lembaga juga mencetak peserta didik yang berakarakter dengan pembiasaan yang diterapkan. Berdasarkan hasil wawancara dari 2 sekolah, menunjukkan permasalahan yang dapat diketahui bahwa pada Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV menunjukkan karakter siswa yang belum memiliki karakter yang baik dalam menjaga lingkungan sekitarnya, hal tersebut ditunjukkan dengan kurangnya perhatian siswa dalam membuang sampah pada tempatnya meskipun telah disediakan fasilitas tempat sampah oleh sekolah, namun masih banyak siswa yang membuang sampah sembarang. Kemudian pada Sekolah Dasar Negeri

Dawuhansengon I menunjukkan karakter peduli sosial yang masih belum diterapkan dengan baik oleh siswa, dimana masih terdapat kesenjangan antar siswa dan terdapat siswa yang tidak memunculkan kepeduliannya terhadap temannya atau antar siswa ketika mengalami kesulitan saat belajar atau ketika memerlukan bantuan.

Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti manajemen kurikulum dalam membentuk karakter peserta didik di dua lembaga pendidikan tersebut, yaitu pada Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I sebagai salah satu contoh sekolah yang menerapkan Kurikulum 2013 berbasis karakter.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian di atas, fokus penelitian ini adalah tentang fungsi manajemen Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan. Berdasarkan fokus penelitian tersebut dirinci dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan?
2. Bagaimana implementasi Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan?
3. Bagaimana evaluasi Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan perencanaan Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan.
2. Untuk menemukan implementasi Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan.
3. Untuk menemukan evaluasi Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon IV dan Sekolah Dasar Negeri Dawuhansengon I Pasuruan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Hal ini dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan manajemen khususnya teori yang terkait dengan bidang manajemen Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu manajemen khususnya dalam bidang manajemen kurikulum pendidikan di masa mendatang.

2. Kegunaan Praktis

a. Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian dan referensi dalam peningkatan kualitas lembaga pendidikan khususnya dari sisi perbaikan – perbaikan manajemen kurikulum pendidikan.

b. Kepala Sekolah

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kebijakan lembaga khususnya yang berkaitan dengan manajemen kurikulum dalam membentuk karakter peserta didik.

c. Guru

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik.

d. Peneliti Lain

Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan manajemen khususnya dalam manajemen Kurikulum 2013 dalam membentuk karakter peserta didik di masa mendatang.